

**PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN PELAKU USAHA
TERHADAP KINERJA USAHA**
(Survey: Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kawasan Universitas Lampung)

(Skripsi)

Oleh

FEBITA MEUTIA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF FINANCIAL LITERACY ON BUSINESS PERFORMANCE OF ENTREPRENEURS

(Survey: Small Micro Business in the Area University of Lampung)

By

FEBITA MEUTIA

Knowledge of finance need to be owned businesses / business to take advantage of the products and non-bank financial institution bank to be able to manage your finances well to be more prosperous. Based on the results of a national survey, financial literacy Indonesia are carried out by the FSA in 2013, the level of financial literacy Indonesian people is only of 21.84% with a rate of 59.74% financial inclusion. The majority of financial inclusion in Indonesia, located in the banking sector. For groups of medium, small and micro enterprises (MSMEs), the level of financial literacy of 15.68% with a rate of 53.34% financial inclusion. Financial literacy is the knowledge, confidence, and skills in managing finances. This experiment aims to find out how much the level of financial literacy and how they affect the performance of entrepreneurs in the area of Lampung University. In this study the variables used are: knowledge, comprehension, and utilization of the allegedly influence on business performance described by descriptive analysis and testing using multiple linear regression. The results showed that the lowest achievement in aspects of the understanding that there are only about 34.601%; and the percentage of the highest achievements are in the aspect of knowledge that is equal to 80%. Knowledge variable and comprehension a significant negative effect on the performance of the business, while only variable utilization positive and significant impact on business performance. It shows knowledge and understanding alone is not sufficient to improve business performance, meaning that required utilization or use of financial products to improve their business performance.

Keywords: financial literacy, MSMEs, the performance of businesses.

ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN PELAKU USAHA TERHADAP KINERJA USAHA

(Survey: Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kawasan Universitas Lampung)

Oleh

FEBITA MEUTIA

Pengetahuan tentang keuangan perlu dimiliki para pelaku usaha/bisnis agar dapat memanfaatkan produk lembaga keuangan bank dan non bank untuk dapat mengelola keuangan dengan baik agar lebih sejahtera. Berdasarkan hasil survei nasional, literasi keuangan Indonesia yang dilaksanakan oleh OJK pada 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,84% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 59,74%. Mayoritas inklusi keuangan di Indonesia, berada di sektor perbankan. Untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tingkat literasi keuangan sebesar 15,68% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 53,34%. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi keuangan serta pengaruhnya terhadap kinerja pelaku usaha yang berada di kawasan Universitas Lampung. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah: pengetahuan, pemahaman, dan pemanfaatan yang diduga berpengaruh terhadap kinerja usaha dijelaskan dengan analisis deskriptif dan pengujian menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian terendah yaitu terdapat di aspek pemahaman yang hanya berkisar 34,601%; dan persentase capaian tertinggi terdapat pada aspek pengetahuan yaitu sebesar 80%. Variabel pengetahuan, dan pemahaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja usaha, sementara hanya variabel pemanfaatan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Hal tersebut menunjukkan pengetahuan dan pemahaman saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja usaha, artinya dibutuhkan pemanfaatan atau penggunaan produk keuangan untuk meningkatkan kinerja usaha.

Kata Kunci: kinerja usaha, literasi keuangan, umkm.

**PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN PELAKU USAHA
TERHADAP KINERJA USAHA**
(Survey: Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kawasan Universitas Lampung)

Oleh

FEBITA MEUTIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

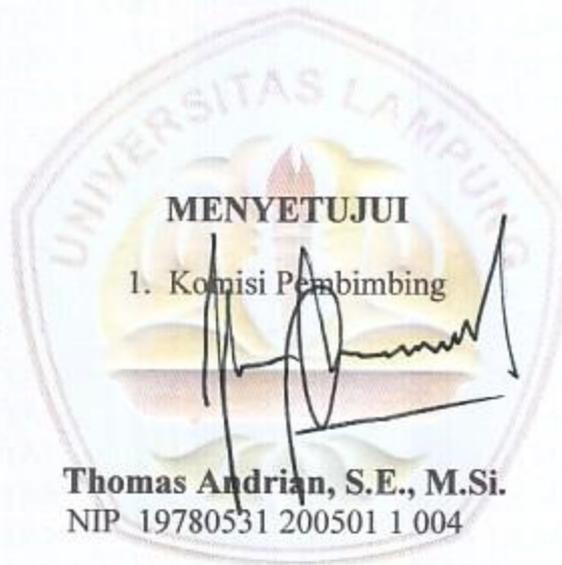
Judul Skripsi : **PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN
PELAKU USAHA TERHADAP KINERJA USAHA**

Nama Mahasiswa : **Febita Meutia**

No. Pokok Mahasiswa : **1211021049**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

MENGESAHKAN

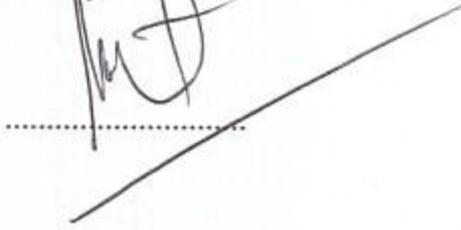
1. Tim Penguji

Ketua : **Thomas Andrian, S.E., M.Si.**



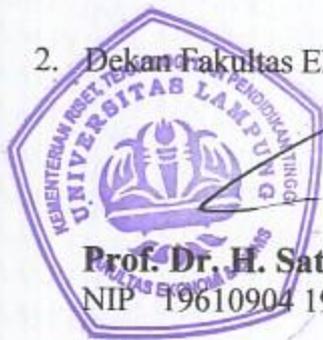
.....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Muhidin Sirat, S.E., M.Si.**



.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Desember 2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa proposal penelitian ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 8 Desember 2016



Febita Meutia

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 November 1994, merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Tatang Karnezi dan Ibu Fera Saffira.

Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 1999, penulis melewati masa kanak - kanak di TK Pertiwi Bandar Lampung, pada tahun 2000. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 2 (Teladan) Rawalaut Bandar Lampung, dan menyelesaikannya pada tahun 2006, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 25 dan diselesaikan pada tahun 2009, kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012. Setelah itu pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis. Pada semester IV atau lebih tepatnya tahun 2014 penulis melakukan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) dengan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan ke berbagai tempat yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Pada tahun 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Pesisir Selatan.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan segala ridho-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tuaku serta teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu dan seluruh pihak yang terlibat atas segala bantuan, dukungan serta motivasinya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan terutama kepada seluruh dosen ekonomi pembangunan dan dosen pembimbing yang telah bersabar dalam membimbing dan memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, serta almamater kebanggaanku Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menjadi referensi serta pedoman dalam penelitian selanjutnya.

MOTO

“Kesuksesan berbanding lurus dengan yang dilakukan, jadilah diri sendiri untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan apa yang kamu impikan”.

(Febita Meutia)

“Life must provide benefits to others. if people don't give the benefits to other people it equals not life.”

(Febita Meutia)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas kasih karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Usaha” ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan, keteladanan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Thomas Andrian, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pelajaran, saran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi Penulis.
5. Bapak Muhiddin Sirat, S.E., M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan nasehat serta masukan yang sangat bermanfaat untuk Penulis.
6. Bapak Imam Awaluddin, S.E., M.E., selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Suyati, Mas Ferry, Mas Ma'ruf, Pak Kasim, dan Pak Rohaidi yang telah banyak membantu.
10. Keluargaku tercinta Ayah dan Ibu serta kakak yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.
11. Sahabat-sahabatku tersayang amoy, anin, biuzar yang selalu menghibur, terimakasih atas motivasi, support, serta canda tawa yang kalian berikan.
12. Sahabat-sahabat SMA tersayang laras, tata, dan varunisa yang selalu mendukung dapat menjadi pendengar yang baik, beruntung punya kalian.
13. Sahabat-sahabat kampus jurusan EP tersayang rini, rina dan devina yang baik dan selalu memotivasi dan mendampingi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN tersayang yose, dimas, arini, fauzi, dan rayyan yang terunik dan terkocak, yang telah mendukung dan memotivasi, beruntung mengenal kalian.

15. Teman-teman bimbingan Charlie's Angels ulfa, ica, mia, vema, dan nwi yang telah bersama-sama berjuang dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman mahasiswa FEB UNILA angkatan 2012 jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah menjadi rekan pembelajaran serta sharing ilmu di kampus ini.
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat serta dapat menjadi tambahan referensi bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 8 Desember 2016

Penulis

Febita Meutia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Kerangka Pemikiran.....	18
1.6 Hipotesis Penelitian.....	20
1.7 Sistematika Penulisan.....	21
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis.....	22
2.1.1 Pengertian Literasi Keuangan.....	22
2.1.2 Kinerja Usaha.....	24
2.1.3 Pengertian Pendapatan.....	25
2.1.4 Pengertian, Jenis, dan Produk Bank.....	27
2.1.5 Fungsi dan Peranan Bank Secara Umum.....	41
2.1.6 E-Banking.....	44
2.1.7 Lembaga Pembiayaan Lainnya.....	50
2.2 Tinjauan Empiris.....	55
2.2.1 Penelitian Terdahulu.....	55
III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian.....	61
3.2 Populasi dan Sampel.....	62
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	63
3.4 Metode Penelitian.....	63
3.5 Teknik dan Pengolahan Data.....	64
3.6 Uji Instrumen.....	66
3.7 Analisis Deskriptif.....	66
3.8 Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
3.9 Uji Asumsi Klasik.....	68
3.10 Uji Hipotesis.....	71

IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Uji Instrumen.....	73
4.2 Analisis Deskriptif.....	75
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	78
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	80
4.5 Uji Hipotesis.....	83
4.6 Implikasi Hasil Regresi Linear Berganda.....	89

V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	91
5.2 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2008-2012.....	2
2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKMK 2008-2012.....	3
3. Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2014.....	4
4. Penghambat demand dan supply dalam akses keuangan.....	11
5. Hasil Uji Validitas Instrumen.....	73
6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	75
7. Hasil Capaian Variabel Pengetahuan.....	75
8. Hasil Capaian Variabel Pemahaman.....	76
9. Hasil Capaian Variabel Pemanfaatan.....	77
10. Hasil Rekap Variabel Pengetahuan, Pemahaman, dan Pemanfaatan.....	77
11. Hasil Regresi Awal.....	79
12. Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
13. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White.....	81
14. Hasil Uji Autokorelasi.....	82
15. Hasil Uji Normalitas.....	83
16. Hasil Uji T.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Rekening/Pembiayaan Provinsi Lampung.....	7
2. Peran Bank Indonesia dalam Keuangan Inklusif	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Hasil Pengisian Kuesioner Variabel (X1) Pengetahuan.....	L-1
2. Data Hasil Pengisian Kuesioner Variabel (X2) Pemahaman.....	L-2
3. Data Hasil Pengisian Kuesioner Variabel (X3) Pemanfaatan.....	L-3
4. Data Hasil Pengisian Kuesioner Variabel (Y) Kinerja Usaha.....	L-4
5. Data Hasil Kuesioner Pertanyaan No. 1 Bagian B. Kinerja Usaha.....	L-5
6. Transformasi Data Ordinal ke Data Interval.....	L-6
7. Data Interval Setelah Smoothing.....	L-7
8. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan (X1).....	L-8
9. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman (X2).....	L-9
10. Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan (X3).....	L-10
11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan (X1).....	L-11
12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman (X2).....	L-12
13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemanfaatan (X3).....	L-13
14. Hasil Regresi Awal.....	L-14
15. Hasil Uji Multikolinearitas.....	L-15
16. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White.....	L-16
17. Hasil Uji Autokorelasi.....	L-17
18. Hasil Uji Normalitas.....	L-18
19. Tabel r.....	L-19

20. Tabel Chi Square (X^2).....	L-20
21. Tabel F.....	L-21
22. Tabel t.....	L-22

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditunjukkan dengan kenaikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Besar kecilnya PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X-M). Untuk mendukung hal tersebut sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah berupaya untuk mengentaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan dan pengangguran. Usaha pengentasan itu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi merangsang peningkatan kebutuhan tenaga kerja.

Secara simultan, meningkatnya kesempatan kerja akan turut mendorong peningkatan pendapatan serta daya beli masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan gagasan yang dikembangkan dari ide tentang *financial inclusion* atau keuangan inklusif. Secara perlahan, program KUR dapat mengisi unit koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Peluncuran program ini, secara mendasar merupakan peran penting sekaligus bentuk nyata dukungan pemerintah bagi perkembangan sektor UMKMK

di Indonesia, dan mampu menyediakan jalan keluar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkualitas.

Tabel 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2008-2013

Tahun	Kontribusi UMKM terhadap PDB (atas harga berlaku)	
	UMKM (Triliun)	Persentase
2008	2.613.226,1	55,67
2009	2.993.151,7	56,53
2010	3.466.393,3	57,12
2011	4.303.571,5	57,94
2012	4.869.568,1	59,08
2013	5.440.007,9	60,34

Sumber: Departemen Koperasi dan UMKM, 2014

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, pada tahun 2008 sektor UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 55,67%. Besaran persentase ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 56,53% pada 2009; 57,12% pada 2010; 57,94% pada 2011; dan 59,08% pada 2012; serta 60,34% pada 2013. Dengan demikian rata-rata kontribusi UMKM terhadap PDB per tahun sejak 2008 hingga 2013 adalah 57,78%. Persentase ini menyumbangkan 3,35% per tahun dari total pertumbuhan ekonomi nasional (Nusron Wahid, 2014:174-179).

Sejalan dengan pertumbuhan unit usaha UMKMK, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pun berlangsung positif. Sejak 2008, sektor UMKMK berhasil menjadi sektor ekonomi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKMK memberi pengaruh yang sangat besar terhadap usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 tentang pertumbuhan penyerapan tenaga kerja

terhadap sektor UMKMK dan sektor koperasi dalam kurun waktu lima tahun. Secara umum, penyerapan tenaga kerja oleh koperasi meningkat sebesar 13,9%, sehingga total jumlah tenaga kerja di koperasi sampai November 2012 tercatat sebanyak 429.678 orang (Nusron Wahid, 2014:174-179).

Kontribusi UMKM terhadap tenaga kerja di Indonesia juga tinggi, hal ini terlihat dari tabel dibawah ini diketahui bahwa pada 2008 jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor UMKMK adalah 94,02 juta orang atau 97,52% dari total tenaga kerja nasional. Pada 2009 angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,33% atau mengalami penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.187.054 orang. Total tenaga kerja di sektor UMKM pada 2009 sendiri mencapai 96,66 juta orang. Demikian pula pada tahun-tahun berikutnya, terus naik hingga total lebih dari 107 juta orang pada 2012, dan meningkat pada tahun 2013 mencapai lebih dari 114 juta orang. Angka menunjukkan bahwa secara persentase sektor UMKMK berkontribusi sebesar 97,55% di tahun 2012 terhadap total penyerapan tenaga kerja nasional (Nusron Wahid, 2014:174-179).

Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKMK pada tahun 2008-2013

Tahun	Sektor Usaha				Kontribusi terhadap Tenaga Kerja Nasional (1) + (2) (%)
	UMKM (orang)	(%)	Koperasi (orang)	(%)	
2008	94.024.278	97,15	3.571	0,37	97,52
2009	96.211.332	97,30	3.909	0,40	97,70
2010	99.401.775	97,22	3.588	0,36	97,58
2011	101.722.458	97,24	3.773	0,37	97,61
2012	107.657.509	97,16	4.297	0,39	97,55
2013	114.144.082	96,99	-	-	-

Sumber: diolah dari publikasi statistik Kementerian Koperasi dan UMK, 2014

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung berdasarkan data agregat yang dihimpun mencapai sebanyak ±375 ribu unit usaha. Jumlah UMKM tersebut 4 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Lampung. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, tentunya diperlukan pemberdayaan UMKM secara bersama. Ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) No 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pelaku usaha UMKM. Berikut dibawah ini Tabel 1.3 Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung yang berupa jumlah UMKM formal di Provinsi Lampung dari tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2014 yaitu sebesar 375.425 unit. Jumlah tersebut, secara umum terdiri dari, yaitu:

1. Usaha Mikro 276.692 unit
2. Usaha Kecil 78.827 unit
3. Usaha Menengah 19.906 unit

Tabel 3. Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Usaha Mikro	227.044	227.683	250.304	276.692
2	Usaha Kecil	64.856	64.989	68.836	78.827
3	Usaha Menengah	15.840	16.328	18.840	19.906
	Jumlah	307.740	309.000	337.980	375.425

Sumber: www.koperasiumkm.lampungprov.go.id, 2015

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi salah satunya diperlukan stabilitas sistem keuangan, dalam hal ini berhubungan dengan keuangan inklusif untuk menciptakan atau meningkatkan layanan keuangan yang menyeluruh dan merata ke semua kalangan masyarakat, baik itu masyarakat

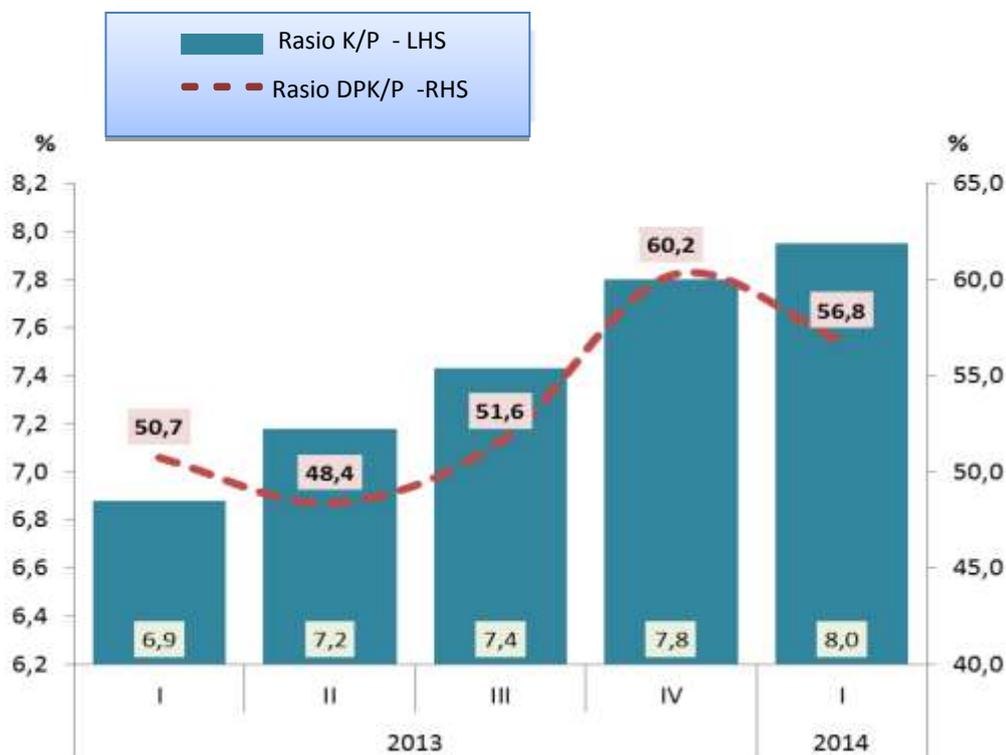
kalangan atas, menengah, maupun kalangan menengah ke bawah. Dalam hal tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, peran pelaku usaha atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan sektor riil sangat berperan penting sebagai salah satu penggerak pembangunan nasional. Perlunya penguatan akses keuangan UMKM kepada sektor perbankan dengan beberapa program perbankan seperti: penyaluran kredit, *branchless banking*, dan tabungan, serta edukasi keuangan. Di era modern seperti sekarang ini dan perkembangan globalisasi yang semakin maju menyebabkan kebutuhan semakin beragam, hal tersebut menuntut kita untuk pintar dalam mengelola keuangan. Disamping itu akses *financial* sudah semakin banyak berkembang dan beragam, tetapi dibutuhkan keahlian untuk dapat mengelolanya. Berkaitan dalam hal pengelolaan keuangan, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan dan pengelolaan keuangan seseorang dapat diukur dengan yang disebut sebagai literasi keuangan.

Literasi keuangan (*financial literacy*) dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan seseorang dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell 2007:21). Pengelolaan dan pengetahuan keuangan yang baik tidak hanya dapat digunakan untuk menabung, berinvestasi, atau hal bermanfaat lainnya, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, dan dapat mengurangi gaya hidup yang konsumtif, karena dapat mengetahui dengan bijak dengan cara membuat keputusan yang efektif untuk perencanaan keuangan di masa depan dan meningkatkan sumber daya keuangan yang dimilikinya. Kesulitan keuangan bukan hanya terjadi oleh seseorang yang memiliki penghasilan rendah atau berpendapatan kecil, tetapi kesulitan keuangan juga dapat terjadi oleh seseorang yang tidak mengetahui atau tidak memahami cara mengelola uang yang baik

dalam hal ini terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti kesalahan penggunaan kredit, berinvestasi, dan tidak mengerti yang mana kebutuhan dan keinginan yang tentunya harus mengutamakan kebutuhan hidup terlebih dahulu, serta tidak adanya perencanaan keuangan, dll. Memahami dan memanfaatkan literasi keuangan, merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera, dan berkualitas. Terlebih lagi jika seseorang dapat mengelola keuangan dengan pintar, diantaranya dapat mengelola kredit dan berinvestasi dengan cerdas. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup di masa depan, diantaranya dapat digunakan untuk mendanai sekolah atau pendidikan tinggi, asuransi, dan program lainnya.

Mengenal lebih jauh tentang keuangan dan cara pemanfaatannya tentu sangat penting terutama di kalangan pelaku usaha atau wirausaha. Pemahaman dan cara mengelola serta memanfaatkan keuangan sangatlah penting karena hal tersebut sangat berguna dan banyak manfaatnya bagi mereka yang membuka usahanya sendiri ataupun bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Untuk dapat meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam memperoleh dana, dibutuhkan lembaga pembiayaan yang melayani peminjaman modal atau kredit usaha. Dalam hal ini, tentunya dibutuhkan keahlian atau pengetahuan dalam hal pengetahuan perbankan, dan lembaga lainnya, serta menggunakan produk-produk tersebut untuk memperoleh akses dana atau modal yang mencukupi untuk mengembangkan usahanya agar dapat memperoleh keuntungan atau mencapai keuntungan yang maksimal. Peranan fasilitas informasi kredit memiliki peran yang sangat penting bagi pendanaan UMKM. Berikut di bawah ini data grafik

jumlah usia produktif yang sudah mempunyai akses kredit/pembiayaan dan yang tidak mempunyai rekening lembaga pembiayaan di Provinsi Lampung pada tahun 2013 sampai dengan triwulan I di tahun 2014.



Gambar 1. Grafik Rekening Kredit/Pembiayaan Provinsi Lampung
Sumber: BI dan BPS Lampung, 2014

Berdasarkan grafik diatas, jumlah penduduk usia angkatan kerja yang memiliki simpanan mengalami *trend* peningkatan. Rasio rekening penghimpunan dana per jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Lampung mencapai 50%-60% pada kurun waktu satu tahun terakhir. Rasio jumlah penduduk Lampung usia produktif yang sudah terakses pada kredit perbankan menunjukkan *trend* yang meningkat, yaitu dari 6,9% pada triwulan I tahun 2013 menjadi 8,0% pada triwulan I tahun 2014. Masih terdapat sekitar \pm 40%-50% penduduk usia produktif di Provinsi Lampung belum mempunyai rekening penghimpunan dana perbankan (tabungan, giro dan deposito). Rasio rekening kredit/pembiayaan terhadap jumlah penduduk

usia produktif di Provinsi Lampung masih perlu untuk didorong dalam rangka meningkatkan kontribusi perbankan terhadap pembangunan di Provinsi Lampung.

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat menjadi *unbanked*, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), desain produk *barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut (Bank Indonesia, 2016):

- Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
- Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa

keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Di berbagai belahan dunia, untuk menurunkan *financial exclusion* dilakukan secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania atau melalui berbagai program terpisah, misal edukasi keuangan seperti dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, *responsible finance* melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran (TKI) sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Permasalahan penghambat yang terjadi pada UMKM dan Keuangan Inklusif (KI) adalah seperti sebagai berikut (Bank Indonesia, 2016):

- tingginya *unbanked people*
- tingginya *gap* kemiskinan antar propinsi
- rendahnya pembiayaan UMKM
- suku bunga kredit mikro tinggi
- *assymetric information*
- kemampuan manajemen UMKM kurang memadai
- monopoli bank pada segmen mikro
- terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan

Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi moneter, sistem pembayaran dan terutama makroprudensial. (Bank Indonesia, 2016)

- Stabilitas Sistem Keuangan

Keuangan Inklusif membantu menurunkan tekanan dari sisi likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko kredit (*credit risk*) di sektor perbankan. Dari sisi likuiditas, perbankan memperoleh sumber dana retail yang relatif lebih stabil meskipun dalam kondisi *shock*. Dari sisi kredit, terbukanya pasar retail baru, khususnya kredit mikro dan kecil sehingga membantu diversifikasi portofolio dan risiko kredit. Selanjutnya program-program keuangan inklusif juga membantu meningkatkan kapabilitas masyarakat dengan munculnya *responsible finance* karena adanya program edukasi keuangan dan perlindungan konsumen.

- Kebijakan Moneter

Dengan keuangan inklusif, *policy rate* dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada mengingat transmisi *policy rate* utamanya dilakukan melalui bank, sehingga membantu efektivitas kebijakan moneter dan tidak ada lagi masyarakat yang terkena *second round effect* dari kebijakan yang dimaksud.

- Sistem Pembayaran

Semakin lancarnya sistem pembayaran ke seluruh pelosok daerah dan digunakan oleh seluruh penduduk dimanapun berada. Disamping itu juga

membantu pelaksanaan program *less cash society* yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian.

Namun dibalik itu terdapat hambatan masyarakat dalam hal akses ke lembaga-lembaga keuangan. Berikut ini hambatan-hambatan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan (Honohan, 2004 - www.bankindonesia.go.id) :

1. Hambatan harga (*price barriers*)
2. Hambatan informasi (*information barrier*)
3. Hambatan desain produk dan jasa (*product and service design barriers*)

Tabel 4. Penghambat antara Demand dan Supply dalam Akses Keuangan

<i>Demand</i> (Masyarakat)	<i>Supply</i> (Penyedia Jasa Keuangan)
<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang rendah • Jarak yang jauh ke lokasi kantor bank terdekat • Mahalnya biaya administrasi dan transaksi untuk volume yang kecil • Informasi produk bank terbatas • Tingkat pengetahuan keuangan yang rendah • Produk yang kurang sesuai • Psikologi, image dan budaya • Antrian yang panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian cabang bank sangat mahal • Persyaratan yang ditetapkan oleh regulator • Persyaratan yang ditetapkan oleh bank • Proses yang kompleks • Formalitas tinggi • Prefer nasabah <i>non-grass root</i>

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Keuangan inklusif merupakan: “Hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap berbagai layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas, dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya..“ (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2012)

Dengan tujuan sbb:

1. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan
2. Menyediakan jasa dan produk keuangan sesuai kebutuhan masyarakat

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan
4. Mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal untuk mendukung *sustainability* pertumbuhan ekonomi nasional
6. Membantu pengurangan kelompok miskin

Indikator perkembangan keuangan inklusif dapat diukur menggunakan 2 dimensi yaitu:

- Dimensi akses: Informasi mengenai keterjangkauan jasa keuangan dengan menggunakan parameter jumlah kantor bank dan ATM.

Pada dimensi akses, tercatat bahwa tingkat penyediaan akses oleh bank kepada masyarakat senantiasa meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah kantor bank dan ATM.

- Dimensi penggunaan (*usage*): Informasi mengenai penggunaan aktual dari jasa/produk keuangan dengan menggunakan parameter jumlah rekening tabungan yang digunakan masyarakat.

Pada dimensi penggunaan, tingkat penggunaan layanan keuangan bank oleh masyarakat juga meningkat yang tercermin dari kenaikan jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) dan rekening kredit.



Gambar 2. Peran Bank Indonesia dalam Keuangan Inklusif
Sumber: Bank Indonesia, 2016

Peran Bank Indonesia dalam keuangan inklusif terdapat dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). SNKI sendiri dimaksudkan sebagai pedoman langkah-langkah strategis lembaga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam SNKI, terdapat beberapa pilar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan

saluran distribusi, serta perlindungan konsumen (Kementerian Keuangan, 2016). Implementasi dari SNKI di Bank Indonesia mengarah kepada fungsi-fungsi dimaksud dengan penekanan implementasi dilakukan melalui aspek sistem pembayaran, yaitu mendidik masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk belajar menyimpan uangnya dari *cash-based*, yaitu menyimpan uang di dalam rumah menjadi *account-based*, yaitu menyimpan uang dalam bentuk rekening uang elektronik. Hal ini dapat membantu mengurangi tendensi konsumtif sekaligus titik awal untuk mengelola keuangan sederhana yang diperkuat dengan program edukasi keuangan. Dengan SNKI tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dari kelompok *the bottom of the pyramid*. Hal ini dapat membantu pengurangan kemiskinan sekaligus memperoleh *dividend demografi* karena tingginya usia produktif Indonesia saat ini dan ke depan.

Anastasia Sri Mendang & Suramaya Suci Kewal (2006) dalam disertasi penelitiannya dalam menguji tingkat literasi keuangan di kalangan Mahasiswa STIE Musi. Dengan menggunakan variabel pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi dan investasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa untuk keputusan keuangan berdasarkan pendapat pribadi, dalam beberapa hal mencerminkan kurangnya pengetahuan tentang bentuk-bentuk investasi jangka panjang yang memberikan imbal hasil dan risiko yang lebih tinggi dari deposito, serta keputusan untuk asuransi jiwa, responden tidak mengerti asuransi jiwa. Boyland dan Warren (2013:79) dalam penelitiannya menilai tentang perbedaan literasi keuangan antara mahasiswa dalam negeri dan mahasiswa internasional. Penelitian dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan apakah mahasiswa tersebut berasal dari dalam negeri atau mahasiswa internasional.

Dalam survei instrumen yang telah dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama berisi 31 pertanyaan yang digunakan untuk menguji literasi keuangan yang di bagi menjadi empat kategori: kategori pendapatan, kategori pengelolaan uang, kategori tabungan, dan kategori pengeluaran. Hasil penelitian sampel untuk mahasiswa domestik dan mahasiswa internasional menunjukkan perbedaan signifikan pada pengelolaan uang dan pengeluaran. Sedangkan untuk pendapatan dan pengetahuan/kebiasaan untuk menabung tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan.

Ibrahim, Harun dan Isa (2009:73) menemukan bahwa mayoritas mahasiswa di Malaysia memiliki pengetahuan keuangan (financial literacy) yang kurang tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan tidak terarah dengan tepat pada saat membuat keputusan keuangan setiap hari. Orton (2007:57) memperjelas dengan menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang karena literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi, namun dari pengalaman-pengalaman di berbagai negara masih menunjukkan relatif kurang tinggi. Byrne (2007:19-40) juga menemukan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah, dan menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak produktif lagi. Sebuah penelitian di Australia pernah mengungkapkan bahwa peningkatan pendidikan finansial pada 10% populasi akan berpotensi meningkatkan ekonomi Australia sebesar 6 miliar dollar Australia per tahun dengan cara membuka 16.000 lapangan kerja baru. Oleh sebab itu, seharusnya anak-anak sekolah sudah dibekali dengan pendidikan finansial, agar nantinya mereka bisa punya kontrol atas uang yang

mereka miliki. Karakteristik belajar ini menurut Bernard (1971), tidak timbul dengan tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul sebagai akibat dari proses partisipasi, pengalaman, kebiasaan diri waktu belajar dan bekerja, dan sikap-sikap lainnya. Secara individual, motivasi dianggap sebagai suatu yang berhubungan dengan adanya kebutuhan insani. Maksudnya adalah seseorang termotivasi untuk mengatur keuangan kalau hasil aktifitasnya itu memenuhi kebutuhannya.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi salah satunya diperlukan stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini berhubungan dengan keuangan inklusif yaitu untuk menciptakan atau meningkatkan layanan keuangan yang menyeluruh dan merata ke semua kalangan masyarakat, baik itu masyarakat kalangan atas, menengah, maupun kalangan menengah ke bawah. Dalam hal tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini merujuk sasaran kepada pelaku usaha berkaitan dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan sektor riil sebagai salah satu yang berperan dalam penggerak pembangunan nasional. Berdasarkan hasil survei nasional, literasi keuangan Indonesia yang dilaksanakan oleh OJK pada 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,84% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 59,74%. Mayoritas inklusi keuangan di Indonesia, berada di sektor perbankan. Untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tingkat literasi keuangan sebesar 15,68% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 53,34%.

Penelitian mengenai tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku usaha atau wirausaha sangat jarang dilakukan, tetapi justru hal dalam pengelolaan keuangan

sangat penting bagi mereka yang menjalankan bisnis/usaha yang memerlukan perencanaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku usaha. Definisi literasi keuangan menurut OJK adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Dan berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang akan diteliti yaitu pendapatan, kepemilikan buku tabungan, pengelolaan keuangan, pengetahuan perbankan, dan pengetahuan lembaga lainnya. Hal tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan cara *survey* langsung menggunakan kuesioner kepada pelaku usaha di kawasan kampus Universitas Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar tingkat literasi keuangan serta pengaruhnya terhadap kinerja pelaku usaha yang berada di kawasan Universitas Lampung.”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi keuangan serta pengaruhnya terhadap kinerja pelaku usaha yang berada di kawasan Universitas Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu pembelajaran dalam berfikir ilmiah, menerapkan teori yang diperoleh ke dalam kasus nyata serta menambah wawasan dan pengalaman khususnya mengenai literasi keuangan.
2. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan pembelajaran mengenai literasi keuangan.
3. Bagi pihak lain, sebagai referensi tambahan dalam pengembangan penelitian dan studi di masa mendatang.
4. Bagi pelaku usaha atau kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), agar dapat mengetahui dimana saja pengelolaan keuangan atau lembaga peminjaman dana dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha.

1.5 Kerangka Pemikiran

A. Kinerja Usaha

Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kinerja usaha yang akan didapatkan dengan merujuk terhadap profitabilitas usaha, dengan menggunakan B/C Ratio yang didapat dari pembagian antara penerimaan dengan biaya.

B. Pengetahuan, Pemahaman, dan Pemanfaatan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

Dalam buku Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2012) dijelaskan klasifikasi tingkatan kategori yang menjelaskan seberapa besar pemahaman mengenai

produk-produk keuangan oleh para pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini, tingkatannya yaitu sebagai berikut:

- *Well Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

- *Sufficient Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

- *Less Literate*

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

- *Not Literate*

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Dalam uraian diatas dapat dilihat bahwa, seseorang dikategorikan mempunyai pengetahuan keuangan yang baik atau *well literate* jika ia mempunyai pengetahuan tentang lembaga keuangan bank dan non bank, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajibannya, serta mempunyai keterampilan dalam hal ini memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang terdapat pada lembaga keuangan bank maupun non bank.

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu: pengetahuan, pemahaman, dan pemanfaatan.

Kerangka pemikiran konseptual terdapat di bawah ini:



Skema Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis Penelitian

- a. “diduga” tingkat pengetahuan pelaku usaha tentang produk serta lembaga keuangan bank dan non bank, berada antara 60-80% dari target yang ditentukan.
- b. “diduga” tingkat pemahaman pelaku usaha tentang produk serta lembaga keuangan bank dan non bank, berada antara 60-80% dari target yang ditentukan.
- c. “diduga” tingkat pemanfaatan pelaku usaha tentang produk serta lembaga keuangan bank dan non bank, berada antara 60-80% dari target yang ditentukan.
- d. “diduga” pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha.
- e. “diduga” pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha.
- f. “diduga” pemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha.

- g. “diduga” keseluruhan variabel pengetahuan, pemahaman, dan pemanfaatan tentang produk serta lembaga keuangan bank dan non bank secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap kinerja usaha.

1.7 Sistematika Penulisan Penelitian

Rencana Penulisan penelitian ini akan dibagi dalam 5 bab, yaitu:

- a. BAB I : Pendahuluan, yang berisikan Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian, dan Sistematika Penulisan Penelitian.
- b. BAB II: Tinjauan Pustaka. Berisikan tinjauan teoritis dan tinjauan empirik yang relevan dengan penelitian ini.
- c. BAB III: Metode Penelitian Terdiri dari variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode penelitian, teknik pengolahan data, uji instrumen, analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.
- d. BAB IV: Hasil dan Pembahasan.
- e. BAB V : Simpulan dan Saran.
- f. DAFTAR PUSTAKA
- g. LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan (*financial literacy*) dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan seseorang dalam mengelola keuangan yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell, 2007:21). Dalam mendalami dan mengetahui seberapa besar tingkat financial literacy seseorang dapat menggunakan tolak ukur pengetahuan meliputi pengelolaan dan penggunaan uang secara efektif untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Dalam buku yang diterbitkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berjudul Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2012) dijelaskan klasifikasi tingkatan kategori yang menjelaskan seberapa besar pemahaman mengenai produk-produk keuangan, dan tingkatannya yaitu sebagai berikut:

- *Well Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

- *Sufficient Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

- *Less Literate*

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

- *Not Literate*

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Definisi literasi keuangan menurut Mason & Wilson (dalam Krisna, 2010:64) adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya. Menurut Jumpstar Coalition (Huston, 2010:44) "*Financial literacy is the ability to use knowledge and skills to manage financial resources effectively for lifetime financial security*". Literasi keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Huston (2010:44) menyatakan bahwa pengetahuan finansial merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi keuangan, namun belum dapat menggambarkan literasi keuangan seseorang. Literasi keuangan memiliki dimensi aplikasi tambahan yang menyiratkan bahwa seseorang harus memiliki

kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan pengetahuannya finansialnya untuk membuat keputusan.

2.1.2 Kinerja Usaha

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165). Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50).

Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Menurut Rivai (2005:309) konsep kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja usaha diukur menggunakan B/C Ratio yang dihasilkan dari

penerimaan atau pendapatan dibagi dengan total biaya. Kriteria kelayakan metode Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) apabila nilai B/C Ratio > 1 maka usaha tersebut dikatakan layak, sebaliknya jika nilai B/C Ratio < 1 maka usaha tersebut dikatakan tidak layak.

2.1.3 Pengertian Pendapatan (Gaji dan Upah)

Pendapatan perorangan dapat berupa gaji atau upah, yang dapat mengukur tingkat kemakmuran seseorang. Gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti (Umar, 2005:34). Gaji adalah pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang (Handoko, 2003:12). Gaji merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai, sehingga dengan gaji yang diberikan pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat (Hariandja, 2002:54).

Gaji merupakan pengganti jasa bagi tenaga-tenaga kerja dengan tugas yang sifatnya lebih konstan. Ditetapkan melalui perhitungan masa yang lebih panjang misalnya bulanan, triwulan atau tahunan. Sedangkan upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan atau pekerja kasar (buruh) berdasarkan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan misalnya jumlah unit produksi. Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sadono Sukirno (2005:351), membuat perbedaan diantara dua pengertian upah, yaitu:

1. Upah Nominal (upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
2. Upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian upah yaitu sebagai berikut:

1. Hasibuan (1997:133), upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.
2. Moekijat (1992:74), menyatakan bahwa upah adalah pembayaran yang diberikan kepada karyawan produksi dengan dasar lamanya jam kerja.
3. Edwin B. Flippo (dalam As'ad, 2004: 92), "a wage a price for the service human being", yang artinya adalah upah merupakan harga yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada para karyawan atas dasar jasa yang telah diberikan oleh karyawan.

2.1.4 Pengertian, Jenis, dan Produk Bank

2.1.4.1 Pengertian Bank

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.4.2 Jenis Bank

1. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usahanya (Totok Budisantoso & Nuritomo, 2013:278-293):

a. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang- undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan- kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menerbitkan surat pengakuan utang.

- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

Disamping kegiatan- kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum di atas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut:

- Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan usaha peransuransian.
- Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang- undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan- kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia(SBI), deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan- kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut:

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- Melakukan penyertaan modal.
- Melakukan usaha perasuransian.
- Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.

2. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha (Totok Budisantoso & Nuritomo, 2013:278-293)

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dalam undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai:

- Susunan organisasi dan permodalan;
- Permodalan;
- Kepemilikan;
- Keahlian di bidang perbankan;
- Kelayakan rencana kerja.

Badan hukum suatu bank umum dapat berupa:

- Perseroan Terbatas;
- Koperasi;
- Perusahaan Daerah.

Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

- Perusahaan daerah;
- Koperasi;
- Perseroan Terbatas;

- Bentuk lain yang di tetapkan peraturan Pemerintah.

3. Jenis Bank Menurut Target Pasar

a. Retail Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun dari pengertian kata ‘kecil’ atau ‘retail’(retail) adalah relative, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar dari Rp 20 miliar.

b. Corporate Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

c. Retail Corporate Bank

Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank

jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi.

4. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a. Bank Konvensional

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Bank Konvensional didefinisikan sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. (Pasal 1 UU Perbankan syariah: 3) Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

b. Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank Syariah menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Pasal 1 UU perbankan syariah; 2) Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.1.4.3 Produk Bank (Simpanan & Pinjaman)

2.1.4.3.1 Simpanan

Bentuk-bentuk simpanan di Bank diantaranya sebagai berikut:

1. Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
2. Deposito Berjangka adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
3. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

4. Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati.

Berikut dibawah ini akan dijelaskan produk simpanan bank yaitu:

1. Simpanan Giro

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Pengertian dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahan-bukuan).

Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

2. Simpanan Tabungan

Menurut UU Perbankan No.10 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Selain itu harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

3. Simpanan Deposito

Menurut UU Perbankan No.10 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula.

2.1.4.3.2 Pinjaman

a. Pengertian Kredit

Pengertian Kredit menurut Bymont P. Kent adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, Pengertian Kredit ialah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh

peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992 mengungkapkan Pengertian Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit berasal dari bahasa Italia, *credare* yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor (pemberi pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bungannya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini ialah kepercayaan moral, komersial, finansial dan jaminan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan reserve. Kepercayaan murni adalah jika kreditor memberikan kredit kepada debitornya hanya atas kepercayaan saja, tanpa adanya jaminan lainnya. Kepercayaan reserve diartikan kreditor menyalurkan kredit atau pinjaman kepada debitor atas kepercayaan, namun kreditor kurang yakin sehingga selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan jaminan atas pinjaman tersebut.

b. Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain (Malayu S.P. Hasibuan. Dasar-Dasar Perbankan, 2008:133-161):

1. Sebagai motivator dan dinamisator dalam peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Menambah lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Memaksimalkan produktivitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna barang
7. Meningkatkan semangat berusaha bagi masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan IPC (*income per capita*) masyarakat
10. Mengubah pola berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

c. Tujuan Kredit

Tujuan kredit yaitu (Malayu S.P. Hasibuan. Dasar-Dasar Perbankan, 2008:133-161):

1. Memperoleh pendapatan bank dari hasil bunga kredit yang diterima
2. Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Untuk memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan

7. Meningkatkan kesejahteraan dan juga pendapatan masyarakat.

d. Macam-macam Kredit atau Jenis-jenis Kredit

Macam-macam kredit berdasarkan tujuan atau kegunaannya, yaitu (Malayu S.P. Hasibuan. Dasar-Dasar Perbankan, 2008:133-161):

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama dengan keluarganya, seperti kredit mobil dan rumah yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif.
2. Kredit modal kerja atau kredit perdagangan ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini sangat produktif.
3. Kredit investasi adalah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, akan tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit ini biasanya diberikan *grace period*, misalnya kredit bagi perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

Macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu, yaitu :

1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu paling lama satu tahun saja.
2. Kredit jangka menengah ialah kredit yang memiliki jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Macam-macam kredit berdasarkan macamnya, yaitu :

1. Kredit aksep merupakan kredit yang diberikan oleh bank yang pada hakikatnya hanya berupa pinjaman uang, biasanya sebanyak plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya.
2. Kredit penjual adalah kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian, contohnya *Usance L/C*.
3. Kredit pembeli ialah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause L/C*.

Macam-macam kredit berdasarkan sektor perekonomian, yaitu :

1. Kredit pertanian ialah kredit yang pemberiannya kepada perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Kredit perindustrian merupakan kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah dan besar.
3. Kredit pertambangan yaitu kredit yang pemberiannya kepada beraneka macam pertambangan.
4. Kredit ekspor-impor adalah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
5. Kredit koperasi yaitu kredit yang pemberiannya kepada jenis-jenis koperasi.
6. Kredit profesi ialah kredit yang pemberiannya kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.

Macam-macam kredit berdasarkan jaminan, yaitu :

1. Kredit jaminan orang merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
2. Kredit jaminan efek adalah kredit yang diberikan dengan jaminan efek-efek dan surat-surat berharga.
3. Kredit jaminan barang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan barang bergerak, barang tetap dan logam mulia. Kredit jaminan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan pasal 1139.
4. Kredit Jaminan dokumen yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C).

Macam-macam kredit berdasarkan golongan ekonomi, yaitu :

1. Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, misalnya KUK, KUT dan lain-lain. Dalam hal ini golongan ekonomi lemah yaitu pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat ialah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

Macam-macam kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan, yaitu :

1. Kredit rekening koran atau kredit perdagangan yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, pelunasannya dengan melakukan setoran-setoran tersebut. Bunga

dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.

2. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit ini dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan ini bisa dilakukan dengan cara mencicil atau sekaligus tergantung kepada perjanjian.

2.1.5 Fungsi dan Peranan Bank Secara Umum

2.1.5.1 Fungsi Bank

Fungsi bank sebagai sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* seperti yang diungkapkan oleh Sigit Triandaru, dan A. Totok Budisantoso (2006:11), yaitu sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanannya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat dilandasi oleh unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemauan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya

bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajibannya lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Sektor dalam perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berintegrasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter juga tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil, dengan kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat menanamkan investasi, distribusi, konsumsi, yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi, ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat.

3. *Agent of Services*

Di samping melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa menyelesaikan tagihan.

Adapun fungsi dan tujuan bank tercantum pada Pasal 3 dan 4 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan maupun perubahannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengatakan bahwa:

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

2.1.5.2 Peran Bank

Berikut dibawah ini peran bank dalam sistem keuangan yaitu sebagai berikut (Totok Budi Santoso & Sigit Triyandoro, 2006:12):

1. Pengalihan aset (*Asset Transmulation*)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini bank berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus (*leaders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

2. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan pada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli barang jadi, maupun jual beli barang mentah dan setengah jadi dalam proses produksi.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-

beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dananya.

4. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

Peranan bank sebagai *Broker* adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Lembaga perantara keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna.

2.1.6 E-Banking

2.1.6.1 Jenis-Jenis E-Banking

1. *Automated Teller Machine (ATM)*

Terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.

2. *Computer Banking*

Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain.

3. *Debit (or check) Card*

Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal *point-of-sale* (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) dari rekening banknya.

4. *Direct Deposit*

Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.

5. *Direct Payment (also electronic bill payment)*

Salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. *Direct payment* berbeda dari *preauthorized* debit dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi *direct payment*.

6. *Direct Payment (also electronic bill payment)*

Bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut.

7. *Electronic Check Conversion*

Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek (nomor rekening, jumlah transaksi, dll) ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut.

8. *Electronic Fund Transfer (EFT)*

Perpindahan “uang” atau “pinjaman” dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik.

9. *Payroll Card*

Salah satu tipe “*stored-value card*” yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayarannya pada terminal ATM atau *Point of Sales*. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik.

10. *Preauthorized Debit (or automatic bill payment)*

Bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu (misalnya pembayaran listrik, tagihan telpon, dll). Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor (misalnya PLN atau PT Telkom).

11. *Prepaid Card*

Salah satu tipe *Stored-Value Card* yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tadi ke penerbit kartu.

12. *Smart Card*

Salah satu tipe *stored-value card* yang di dalamnya tertanam satu atau lebih *chips* atau *microprocessors* sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, atau melakukan proses untuk tujuan khusus (misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi). Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka (misalnya untuk pembayaran transportasi publik) atau sistem tertutup (misalnya MasterCard atau Visa networks).

13. *Stored-Value Card*

Kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter, yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain
(Sumber: www.banking.blog.gunadarma.ac.id)

2.1.6.2 Contoh-contoh E-Banking yang Diterapkan di dalam Bank

- *ATM, Automated Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri
Ini adalah saluran *E-Banking* paling populer. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (*voucher* dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM). Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai

mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul pula ATM yang dapat menerima setoran uang, yang dikenal pula sebagai *Cash Deposit Machine/CDM*. Layaklah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan kemudahan penggunaannya.

- *Phone Banking*

Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam/HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, layanan Phone Banking hanya bersifat informasi yaitu untuk informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh *Customer Service Operator/CSO*. Namun profilnya kemudian berkembang untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain; serta dilayani oleh *Interactive Voice Response (IVR)*. Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non tunai, karena cukup menggunakan telepon/HP di manapun kita berada, kita bisa melakukan berbagai transaksi, termasuk transfer ke bank lain.

- *Internet Banking*

Ini termasuk saluran terbaru e-Banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi

pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA.

- *SMS/m-Banking*

Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari Phone Banking, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms.

Di balik kemudahan e-Banking tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan pengamanan yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan untuk Phone Banking, Internet Banking, dan SMS/m-Banking, nasabah diberikan kode pengenalan (*user id*) dan PIN. Sebagai pengamanan tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random. Sedangkan untuk SMS Banking, nasabah diminta untuk mendaftarkan nomor HP yang digunakan.

(Sumber: www.wartawarga.gunadarma.ac.id/sistem-perbankan-elektronik)

2.1.7 Lembaga Pembiayaan Lainnya

Selain bank, lembaga keuangan non perbankan lainnya yang dapat memberikan layanan pembiayaan adalah:

1. Modal Ventura

Pengertian Perusahaan Modal Ventura sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah “Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.”

Adapun beberapa ahli yang mendefinisikan tentang modal ventura antara lain:

1. Handowo Dipo

Suatu dana usaha dalam bentuk pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham.

2. Toni Lorenz

Investasi jangka panjang, dimana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan deviden atau bunga.

3. Robert White

Usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk atau mengembangkan usaha-usaha baru dibidang teknologi dan non teknologi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, sementara modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya.

Instrumen lain yang dapat digunakan dalam rangka modal ventura adalah obligasi konversi (*convertible bond*) yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham PPU. Umumnya pembiayaan modal ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal ventura. (Frianto, Elly Santi, dan Achmad Abror, 2005:85).

Karakteristik yang sangat menonjol dalam usaha modal ventura berkaitan dengan risiko. Besarnya risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya *expected return* yang diharapkan oleh *venture capitalist*. Oleh karena itu, modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti usaha-usaha baru di bidang pengembangan teknologi. Bahkan, perusahaan modal ventura bersedia untuk membiayai gagasan-gagasan yang diperkirakan akan dapat dikembangkan menjadi suatu usaha yang memberikan keuntungan yang berlipat.

Ciri-ciri utama modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity financing*) dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, penyertaan modal tersebut, lebih lanjut, dapat dimodifikasi menjadi *semi equity financing*. Di samping itu, karakteristik lain modal ventura adalah tingginya risiko yang mungkin dihadapi oleh pemodal. Jangka waktu penyertaan saham modal ventura bersifat sementara. Di beberapa negara jangka waktu pembiayaan modal ventura berada diantara 3 – 10 tahun. Di Indonesia sendiri, jangka waktu tersebut menurut Keppres No.

61/1988 adalah sudah harus diinvestasi maksimum 40 tahun. Ciri inilah pula yang membuat unik dan membedakannya dengan investasi biasa. (Siamat. 2005:567).

2. Koperasi

Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian: “Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bergerak di bidang sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Menurut Sagimun M.D dalam buku Koperasi Indonesia (1990:2) adalah: Koperasi adalah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki anggotanya. Tujuan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah: Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan manfaat koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992: Manfaat koperasi adalah untuk mencapai dan memelihara kesatuan hukum koperasi dengan mematuhi sandi-sandi koperasi sendiri dan memberikan usaha pembinaan kepada para anggota yang umumnya berekonomi lemah. Penetapan manfaat koperasi yang diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian bertujuan agar segala aktivitas koperasi tidak menyimpang dari apa yang diharapkan organisasi koperasi tersebut. Artinya segala aturan dalam

perkoperasian dan segala yang menjadi sasaran koperasi harus benar-benar dapat merasakan keberadaan koperasi tersebut.

Menurut Panjdi Anoraga dalam bukunya Manajemen Koperasi Tahun 2000 jenis koperasi dapat dibagi menjadi:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

2. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi adalah barang kebutuhan sehari-hari misalnya :

- Barang pangan seperti beras, gula, garam, minyak kelapa dan sebagainya
- Barang-barang sandang seperti kain batik, tekstil dan sebagainya
- Barang untuk membantu keperluan sehari-hari seperti sabun, minyak tanah dan sebagainya.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh para anggotanya sendiri.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu, baik bagi para anggotanya maupun bagi para masyarakat umum.

5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu maca kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya.

3. Pegadaian

Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antar nasabah dengan lembaga gadai.

Dan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Manfaat utama diperoleh oleh nasabah yang meminjamkan dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana bagi prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan disamping itu mengingat jasa yang ditawarkan oleh perum pegadaian tidak hanya Jasa pegadaian maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atas suatu barang penjual dan pembeli sering sulit sampai suatu kesepakatan yang sama.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan bepergian, merasa kurang aman menetapkan barang bergerak di tempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di perum pegadaian. (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2013:278-293)

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Penelitian Terdahulu

1. Ayu Krishna, S.Sos., M.M., Maya Sari, S.E., M.M., dan Rofi Rofaida, S.P., M.Si., (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

(Survey Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia) menggunakan variabel pengetahuan keuangan, investasi, tabungan, kredit, asuransi, dan demografi menggunakan descriptive survey dan explanatory survey menunjukkan hasil pengukuran skor rata-rata tingkat literasi mahasiswa UPI yang menjadi responden pada penelitian ini sebesar 63%. Skor rata-rata sebesar 63%, menunjukkan tingkat literasi keuangan mahasiswa masih jauh dari batas optimum bahkan mendekati kelompok kategori tingkat literasi keuangan yang rendah, hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan finansial mahasiswa sebagai pembentuk literasi keuangan mahasiswa relatif belum optimal dan harus lebih ditingkatkan lagi.

2. Dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Mahasiswa Dalam Menabung (Studi Kasus Mahasiswa SI FEB UNDIP) menggunakan variabel literasi keuangan, pengendalian diri, motif menabung, pendapatan, dengan alat analisis model regresi logistik dan model tobit. Hasil penelitian dengan menggunakan model regresi logistik menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, variabel pengendalian diri, variabel motif menabung, variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas menabung. Sedangkan hasil penelitian dengan menggunakan model tobit menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, variabel pengendalian diri, variabel motif menabung, variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tabungan. (Arwansa Wahana, 2014).
3. Jane Boyland dan Ray Warren (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Assessing the Financial Literacy of Domestic and International College*

Students menggunakan variabel *financial literacy*, *financial literacy education*, *jump\$start survey*, *college students* dengan alat analisis t-test dan ANOVA. Dalam hasil penelitian pertama mengungkapkan bagaimana perbandingan hasil jumlah jawaban yang benar dalam presentase dari kuisisioner yang di dapat oleh peneliti dengan kuisisioner yang telah dipublikasikan oleh Jump\$start. Tidak terjadi perbedaan di dalam hasil penelitian tersebut. pendapatan menurut peneliti adalah 59.7% dan menurut Jump\$start 56.1%, pengelolaan uang 44.8% menurut peneliti dan 40.9% menurut Jump\$start, tabungan 49.2% dan 43.2% menurut peneliti, pengeluaran 54.3% dari hasil penelitian dan 50.8% dari sumber Jump\$start, kredit 48.4% dari hasil penelitian dan 44.1% dari Jump\$start. Mengenai jawaban yang benar mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, tidak ada dampak yang signifikan untuk jenis kelamin, $t(89) = 0,06881$; $p > 0,05$. Sedangkan perbedaan jawaban yang benar mahasiswa yang dibedakan berdasarkan mahasiswa domestik dengan mahasiswa internasional, ada dampak yang signifikan untuk jenis kelamin, $t(89) = 0,00009$; $p > 0,05$.

4. Dalam analisis deskriptif penelitian yang berjudul Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa STIE Musi menggunakan variabel pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi dan investasi, diperoleh hasil untuk keputusan keuangan berdasarkan pendapatan pribadi dalam beberapa hal mencerminkan kurangnya pengetahuan tentang bentuk-bentuk investasi. (Anastasia Sri Mendang Suramaya Suci Kewal, 2013).

5. Penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor menggunakan variabel struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, pemahaman *good governance*, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen organisasi menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, pemahaman *good governance*, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor diketahui nilai thitung $2,711 > t_{tabel} 2,021$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,010 < \alpha = 0,05$ maka struktur audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan struktur, seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor. Pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor diperoleh thitung $2,271 > t_{tabel} 2,021$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,033 > \alpha = 0,05$; sehingga konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor. Untuk pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor diperoleh thitung $3,623 > t_{tabel} 2,021$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$; sehingga ketidakjelasan peran berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor diperoleh thitung $-2,239 < t_{tabel} 2,021$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,031 < \alpha = 0,05$. Artinya, pemahaman *good governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Seorang auditor yang hanya memahami *good governance* tetapi dalam pelaksanaannya tidak menerapkan secara benar maka akan mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga kinerjanya akan menurun. Pengaruh gaya

kepemimpinan terhadap kinerja auditor diperoleh thitung $2,507 > t_{tabel} 2,021$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,017 < \alpha = 0,05$; sehingga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini disebabkan oleh hubungan antara atasan dan bawahan sangat dekat, komunikasi antara atasan dan bawahan sangat terbuka sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor diperoleh thitung $2,623 > t_{tabel} 2,021$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,013 < \alpha = 0,05$; sehingga budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Semakin baik dan tinggi nilai budaya organisasi, semakin tinggi pula kinerja yang dicapai oleh seorang auditor. Sementara untuk pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor diperoleh thitung $2,493 > t_{tabel} 2,021$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,017 < \alpha = 0,05$; sehingga komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dimana dia bekerja maka akan timbul rasa memiliki terhadap organisasi, dia akan merasa senang dalam bekerja dan akan bekerja sebaik mungkin untuk organisasinya tersebut sehingga kinerjanya akan meningkat (Heny Arianti, 2015).

6. Penelitian Aditya F. Siregar (2009) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian Wirausaha Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Jasa di Kota Medan. Didapatkan hasil pengujian secara parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Akuntansi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada tingkat kepercayaan 95%, sedangkan variabel Kepribadian Wirausaha tidak memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja

Manajerial. Pengujian secara simultan (bersama-sama), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan seluruh variabel bebas yang terdiri dari Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian Wirausaha berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial pada perusahaan jasa di Kota Medan. Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak, dan H_a sebagai hipotesis alternatif diterima.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

3.1.1 Variabel Terikat

A. Kinerja Usaha

Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kinerja usaha yang akan didapatkan dengan merujuk terhadap profitabilitas usaha, dengan menggunakan B/C Ratio yang didapat dari pembagian antara penerimaan dengan biaya.

3.1.2 Variabel Bebas

Sementara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Pengetahuan (X1)

Less Literate

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

B. Pemahaman (X2)

Sufficient Literate

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

C. Pemanfaatan (X3)

Well Literate

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pelaku usaha di kawasan kampus Universitas Lampung sejumlah 198 orang. Dan metode penarikan sampling menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel yaitu *judgement sampling*. *Judgement sampling* adalah salah satu jenis dari *purposive sampling* selain *quota sampling* dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di kawasan kampus Universitas Lampung. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berkisar 66 orang pengusaha di kawasan kampus Universitas Lampung dengan menggunakan Rumus Slovin (dalam Riduwan, 2005:65).

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi yaitu sebesar 198 orang

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, 10%

3.3 Jenis dan Sumber Data

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2009:56). Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data hasil pengisian kuesioner oleh pelaku usaha di kawasan kampus Universitas Lampung (UNILA) yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang menjadi responden.

B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi, hasil dari pengumpulan dan pengolahan dari pihak lain. Pada penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Kementerian Koperasi dan UMK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, jurnal ilmiah, dan studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan meliputi:

a) Metode penelitian kepustakaan

Dilakukan dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel serta mengambil data-data yang menunjang untuk kepentingan landasan teori dalam mendukung analisis yang digunakan.

b) Metode Analisis

Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh berdasarkan pengisian hasil kuesioner oleh responden yaitu para pelaku usaha di kawasan kampus Universitas Lampung (UNILA) dengan metode analisis

deskriptif, uji instrumen, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Menurut Hasan (2006:31), “pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu”. Sedangkan menurut Sudjana (2001:64), “Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut”

Pengolahan data menurut Hasan (2006:32) meliputi kegiatan:

1. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi. Editing dalam penelitian ini yaitu mengecek atau mengoreksi kuesioner penelitian yang telah disebar.

2. *Coding*

(Pengkodean) *Coding* adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. *Coding* dalam penelitian ini yaitu memberikan kode terhadap kuesioner yang akan dianalisis, dari 66 kuesioner yang telah disebar masing-masing kuesioner diberikan kode jawaban berupa angka 1 sampai dengan 5 dengan keterangan masing-masing angka tersebut

yang mempunyai tingkatan yang membedakan jawaban dari tiap-tiap responden.

3. Tabulasi

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabulasi dalam penelitian ini yaitu jawaban dari kuesioner yang telah disebar di masukkan ke dalam tabel sesuai dengan analisis.

4. Pemberian skor atau nilai

Dalam penelitian ini untuk pemberian skor yang digunakan adalah skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Sugiyono (2009:98) skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur. Berdasarkan pengertian diatas, maka skala yang digunakan adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2009:98) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, responden dapat memilih jawaban yang diberi skor mulai dari skor tertinggi hingga terendah yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Khusus untuk cara mengukur digunakan pendekatan kuantitatif yang

menggunakan beberapa sebutan/istilah, seperti mendekati sesuai dan lainnya dalam bentuk angka maupun persentase.

3.6 Uji Instrumen

3.6.1 Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali,2011:52). Alat uji yang digunakan pada uji validitas adalah korelasi antara indikator masing- masing pertanyaan dengan total skor dari indikator dalam satu variabel. Ketentuan valid atau tidaknya dapat ditentukan dengan kriteria nilai r .

- b) Jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan tersebut di anggap valid.
- c) Jika r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan tersebut di anggap tidak valid.

3.6.2 Uji Realibilitas

Digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden atas pernyataan itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliable dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach Alpha $>$ 0,7 (Ghozali, 2011:47).

3.7 Analisis Deskriptif

Berdasarkan data yang telah diperoleh dengan besaran jumlah responden sebanyak 66 orang, dalam penelitian ini akan dijelaskan tingkatan kategori yang menjelaskan seberapa besar pemahaman mengenai produk-produk keuangan oleh

para pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini, tingkatannya yaitu sebagai berikut (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, 2012):

- *Well Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

- *Sufficient Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

- *Less Literate*

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

- *Not Literate*

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Dari hasil penelitian akan diperoleh besaran skor dari setiap responden, kemudian akan dilakukan analisis sesuai besaran persentase dan akan dijelaskan sesuai dengan klasifikasi diatas.

3.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon t$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

$X_1, X_2,$ dan X_3 = Variabel independen

b_0 = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

ϵt = Error term

3.9 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Multikolinearitas

Salah satu masalah penting dalam penggunaan analisis regresi berganda adalah kemungkinan kolinearitas dari variabel-variabel independen yang ada. Kondisi ini mengacu pada situasi dimana satu atau lebih variabel independen yang ada berkorelasi tinggi dengan variabel independen lainnya sehingga variabel independen dapat menjelaskan dengan lebih pasti bagi variabel dependennya. Metode yang digunakan untuk mengukur kolinearitas ini adalah menggunakan Variance Inflationary Factor (VIF) dan Tolerance.

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat pada:

a) Melihat nilai Tolerance

- Tidak terjadi Multikolinearitas jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10
- Terjadi Multikolinearitas jika nilai Tolerance lebih kecil dari atau sama dengan 0,10

b) Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor)

- Tidak terjadi Multikolinearitas jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00
- Terjadi Multikolinearitas jika nilai VIF lebih besar dari atau sama dengan 10,00

3.9.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini akan terjadi apabila varian e (*error/gangguan*) tidak mempunyai penyebaran yang sama, sehingga model yang sudah dibuat menjadi kurang efisien. Asumsi yang diharapkan adalah bahwa variasi error peramalannya homogen bukan heterogen. Sedangkan menurut Gujarati, 2003, heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan varian (homoskedastisitas), yaitu *varians error* bernilai sama untuk setiap kombinasi tetap dari X_1, X_2, \dots, X_p . Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka dugaan OLS tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), karena akan menghasilkan dugaan dengan galat baku yang tidak akurat. Untuk uji asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat melalui Uji White.

Untuk Uji White menggunakan rumusan hipotesis dan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a) H_0 ditolak dan H_a diterima, jika nilai p value *-obs*-square* $< X^2$ tabel
- b) H_0 diterima dan H_a ditolak, jika nilai p value *-obs*-square* $< X^2$ tabel

Jika H_0 ditolak, berarti terdapat heteroskedastisitas. Jika H_0 diterima berarti tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.9.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan kondisi dimana kesalahan/gangguan (varian e) saling berkorelasi dan hal ini terjadi apabila terdapat hubungan yang signifikan antara dua data yang berdekatan. Kenyataan yang diharapkan adalah autokorelasi itu tidak ada. Adanya korelasi mengakibatkan estimatornya menjadi konsisten, tidak bias, tetapi tidak efisien karena interval estimasinya akan melebar sehingga daya prediksinya menjadi underestimate dan selanjutnya akan menjadikan F yang diperoleh tidak valid. Mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan melalui uji *Lagrange Multiplier Test* (LM Test), dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a) Jika H_a , $p \text{ value } -obs^* \text{-square} < X^2$ tabel maka dinyatakan bahwa ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan.
- b) Jika H_0 , $p \text{ value } -obs^* \text{-square} < X^2$ tabel, maka dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan.

Jika H_0 ditolak, berarti terdapat autokorelasi. Jika H_0 diterima berarti tidak terdapat autokorelasi.

3.9.4 Uji Normalitas

Deteksi normalitas adalah untuk mengetahui apakah data sudah tersebar secara normal dan dapat dikatakan terdistribusi normal atau tidak. Tetapi apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi distribusi normal, maka masih tetap menghasilkan pendugaan koefisien regresi yang linear, tidak terbias dan terbaik.

Penyimpangan asumsi normalitas ini semakin kecil pengaruhnya apabila jumlah sampel diperbesar. Uji normalitas ini dapat menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov.

Kriteria pendeteksiannya adalah:

- a) H_0 ditolak dan H_a diterima, jika Sig. value $< \alpha$ 5%
- b) H_0 diterima dan H_a ditolak, jika Sig. value $> \alpha$ 5%

Jika H_0 ditolak, berarti data tidak tersebar normal. Jika H_0 yang diterima berarti data tersebar normal.

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Uji T

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 90% atau $\alpha = 10\%$ dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a) H_0 diterima H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$
- b) H_0 ditolak H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Jika H_0 ditolak, berarti peubah bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap peubah terikat. Jika H_0 diterima berarti peubah bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap peubah terikat (Gujarati , 2003:1290).

3.10.2 Uji F

Untuk pengujian hipotesis keseluruhan dengan menggunakan uji statistik F-hitung dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90% atau $\alpha = 10\%$ dengan derajat kebebasan $df1 = (k-1)$ dan $df2 = (n-k-1)$.

Kriteria pengujianya adalah sebagai berikut:

a) H_0 diterima H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

b) H_0 ditolak H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Jika H_0 ditolak, berarti peubah bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap peubah terikat. Jika H_0 diterima berarti peubah bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap peubah terikat (Gujarati, 2003:257).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Hasil uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS terdapat 3 variabel yang diuji yaitu variabel (X1) Pengetahuan, (X2) Pemahaman, dan (X3) Pemanfaatan, kuesioner dinyatakan valid dan reliabel.
2. Hasil analisis deskriptif pengetahuan responden yang merupakan pelaku usaha di kawasan Universitas Lampung kurang mengetahui mengenai deposito yang berkisar 63,030%; dan pengetahuan pelaku usaha mengenai ATM sangat tinggi yaitu berkisar 98,788%.
3. Hasil analisis deskriptif pemahaman responden yang merupakan pelaku usaha di kawasan Universitas Lampung hanya sedikit yang memahami mengenai cek/bilyet giro yang hanya berkisar 36,667%, dan pemahaman pelaku usaha mengenai perbankan dalam hal transfer adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 91,212%.
4. Hasil analisis deskriptif pemanfaatan responden yang merupakan pelaku usaha di kawasan Universitas Lampung sangat sedikit yang memanfaatkan pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat meminjamkan dana yang hanya berkisar 23,636%; dan pemanfaatan pelaku usaha mengenai ATM yang paling tinggi yaitu berkisar 57,879%.

5. Tingkat literasi keuangan didapatkan persentase capaian terendah yaitu terdapat di aspek pemanfaatan yang hanya berkisar 34,601%; dan persentase capaian tertinggi terdapat pada aspek pengetahuan yaitu sebesar 80%.
6. Hasil uji F didapatkan hasil bahwa ada pengaruh secara signifikan antara pengetahuan, pemahaman, dan pemanfaatan secara bersama-sama terhadap terhadap kinerja usaha.
7. Sementara dalam hasil uji T didapatkan hasil yaitu variabel pengetahuan, dan pemahaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja usaha, sementara hanya variabel pemanfaatan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha.
8. Hasil penghitungan jumlah skor responden mengenai opini atau pendapat mereka mengenai pertanyaan apakah usaha anda semakin maju dengan pemanfaatan fasilitas/sarana perbankan dan non bank didapatkan hasil 73,940% menyetujui hal tersebut.

5.2 Saran

Literasi keuangan yang baik perlu diikuti dengan ketersediaan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan terutama masyarakat/pelaku usaha menengah ke bawah. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan infrastruktur, pemeratan jumlah kantor lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank ke seluruh daerah agar jumlahnya merata dan mudah diakses bagi masyarakat/pelaku usaha terutama kalangan menengah kebawah. Diharapkan lembaga penyedia jasa keuangan dapat berkontribusi untuk meningkatkan keterampilan konsumen dalam memanfaatkan produk dan/atau

layanan jasa keuangan, yaitu salah satunya dengan mengedukasi masyarakat/pelaku usaha mengenai jenis dan bentuk dari produk dan/atau layanan jasa keuangan serta gambaran mengenai praktik pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan konsumen, masyarakat, serta pelaku usaha dalam memahami produk serta lembaga bank dan non bank.

Edukasi keuangan dilakukan agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan/atau layanan jasa keuangan, untuk mengelola keuangan, terlebih agar dapat paham mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dengan pemahaman yang baik pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penting dilakukan, namun upaya lain terkait dengan upaya memotivasi pelaku usaha, memberikan insentif bagi pelaku usaha, serta perlu adanya upaya bantuan manajemen dan bantuan permodalan yang tepat, dan upaya lain dalam rangka meningkatkan penggunaan produk keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Heny. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bank Indonesia diakses melalui *www.bi.go.id*
- Badan Pusat Statistik diakses melalui *www.bps.go.id*
- Bernard; Harold, W. 1971. *Principles of guidance: A Basic Text*. Pennsylvania: Sacranton.
- Boylard, Jane & Ray Warren. 2013. *Assessing the Financial Literacy of Domestic and International College Students*, hlm 79.
- Byrne, A. 2007. *Employee saving and investment decisions in defined contribution pension plans: survey evidence from the U.K. Financial Services Review* 16 (2007), hlm 19-40.
- Dessler, Gary. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Terjemahan. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Handoko TH,. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, hlm 12.
- Hariandja, Marihot T.E, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo, hlm 54.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 133-161.

Huston, S.J. 2010. *Measuring financial literacy*. *Journal of Consumer Affairs*, hlm 44 (2).

Husein Umar. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 34.

Ibrahim, D, Harun, R. & Isa, Z. M. 2009. *A Study on Financial Literacy of Malaysian Degree Students*. *Cross-cultural Communication* ISSN 1712-8358, Vol.5 No.4 2009, hlm 73.

Kementerian Keuangan diakses melalui www.kemenkeu.go.id

Kementerian Koperasi dan UMKM. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Usaha Besar (UB) Tahun 2008-2012”. Diakses melalui www.depkop.go.id

Kementerian Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. “Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2014”. Diakses melalui www.koperasiumkm.lampungprov.go.id

Krishna, A., Rofaida, R., & Sari, M. 2010. Analisis tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Pro-ceedings of the 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia*, hlm 64.

Luthans, F. 2005. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-hill.

Lusardi, A & Mitchell, O. S. 2006. *Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing*, hlm 21. Diakses melalui www.google.com-financialliteracy

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.

- Mendang, Anastasia Sri & Suramaya Suci Kewal. 2006. *Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa STIE Musi*. Palembang.
- Mudrajat, Kuncoro. 2009 dan 2010. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, hlm 56.
- Nurlaila. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Penerbit LepKhair.
- Orton, L. 2007. *Financial Literacy: Lessons from International Experience*. CPRN Research Report September 2007, hlm 57.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2012. *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. Jakarta.
- Pandia, Frianto; Elly Santi Ompusunggu; dan Achmad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Asdy Mahasatya, hlm. 85.
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sagimun, M.D. 1983/1984. *Koperasi Indonesia: Bacaan Populer untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Percetakan Manasco, hlm 2.
- Santoso, Totok Budi dan Sigit Triyandoro. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, hlm 11-12.
- Santoso, Totok Budi dan Nuritomo. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, hlm 278-293.
- Siamat, D. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Kesatu, hlm 189 dan 567.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar edisi ketiga*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, hlm 351.

Tribun News diakses melalui www.makassar.tribunnews.com/2015/05/24/ini-strategi-ojk-mendorong-literasi-keuangan

Wahid, Nusron. 2014. *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm 174-179.

Wahana, Arwansa. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Mahasiswa Dalam Menabung (Studi Kasus Mahasiswa SI FEB UNDIP)*. Semarang: Universitas Diponegoro.